



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD MUNIEF BUDIMAN**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT NIAGA DAN PEMASARAN**
3. NHK : **197133**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.315.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/240 m² di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 2.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/110 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 252 m² di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. Bangunan Seluas 34 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 990.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET MINIBUS Tahun 2013, WARISAN Rp. 75.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
4. MOBIL, MAZDA CX3 / SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 271.350.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 823.323.888



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 6.399.673.888

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 6.399.673.888

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.